



Pendampingan Penataan Administrasi Desa Leahari Menggunakan Aplikasi *Microsoft Office* Menuju Desa Mandiri Statistik

**Rosanti Laing¹⁾, Zamrah Mutmainah²⁾, Ernest Bonaventura Maskikit³⁾, Ferry Kondo
Lembang⁴⁾, Dorteus Lodewiyk Rahakbauw⁵⁾**

^{1,2,3,4)}Program Studi Statistika FMIPA Universitas Pattimura

⁵⁾Program Studi Matematika FMIPA Universitas Pattimura

ferrykondolembang@gmail.com

ABSTRAK: Desa Leahari terletak di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon Provinsi Maluku termasuk salah satu dari dua wilayah desa di Kota Ambon yang masuk kategori desa sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun. Perubahan status desa dari tertinggal menjadi desa berkembang tentu dibutuhkan sistem manajemen desa yang lebih tertata rapi dan aparatur desa dengan kapasitas terbaik. Atas dasar gagasan kegiatan ini dilakukan, bertujuan untuk melakukan Pendampingan *Updating* Data Kependudukan Desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data kependudukan dan administrasi desa menggunakan aplikasi *Microsoft office*, dan merancang *database* desa secara digital untuk membantu pengelolaan data yang lebih *update* di masa kini dan masa akan datang dengan pemateri berasal dari tim dosen dan mahasiswa tim Program Holistik Pemberdayaan dan Pembinaan Desa (PHP2D). Target dari kegiatan ini antara lain , data Kependudukan Desa sudah *terupdate*, meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data kependudukan dan administrasi desa, dan tersedianya *database* kependudukan desa secara digital.

Kata kunci :Desa Leahari, Kependudukan, *Microsoft Office*, *Database*

ABSTRACT: *Leahari Village is located in South Leitimur District, Ambon City, Maluku Province, including one of two village areas in Ambon City which is categorized as very underdeveloped village based on the Village Building Index data. The change in the status of the village from being left behind to being a developing village certainly requires a more well-organized village management system and village apparatus with the best capacity. On the basis of the idea that this activity was carried out, it aims to provide Assistance for Updating Village Population Data, increase the capacity of village officials in managing population data and village administration using Microsoft office applications, and designing databases to help manage data that is more updated today and in the future. will come with speakers from a team of lecturers and students from the Holistic Village Empowerment and Development Program (PHP2D). The targets of this activity include updated, increased capacity of village officials in managing population data and village administration, and the availability database of a digital village population.*

Keywords: *Leahari Village, Population, Microsoft Office, Database*

PENDAHULUAN

Desa Leahari yang terletak di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon Provinsi Maluku termasuk salah satu dari dua wilayah desa di Kota Ambon yang masuk kategori desa sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM). Menyikapi hal dimaksud, dibutuhkan identifikasi terhadap persoalan yang mendasar sehingga dapat diketemukan bentuk intervensi yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan

desa. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Desa Leahari selain permasalahan aspek fisik yakni permasalahan aspek sosial ekonomi salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Hal inilah yang menjadi fokus kegiatan tim khususnya SDM Aparatur Desa Leahari sebagai ujung tombak pembangunan desa.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah yang secara teknis diuraikan sehingga terbuka peluang bagi tercapainya kemandirian desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b juga memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana didalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (Barniat, 2019). Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Pemberlakuan otonomi desa seyogyanya menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Kemandirian desa dapat diukur dalam berbagai aspek salah satunya adalah penataan administrasi desa yang disajikan dalam dokumen/arsip yang terdokumentasi secara baik dan *update*. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 mengatakan salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik (Lembong *et al*, 2017). Keberhasilan pemerintahan desa banyak bergantung pada kelengkapan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin artinya administrasi desa sangat menentukan kedudukan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan desa maka sudah seyogyanya pembinaan administrasi desa perlu mendapat perhatian serius pemerintah desa.

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Nurcholis 2011:135). Atas dasar amanat undang-undang terkait otonomi desa dimana menjamin kemampuan desa untuk mengatur dirinya sendiri sehingga seluruh administrasi yang ada di desa harus tertata dengan baik sehingga nantinya desa menjadi sebuah desa mandiri dan tertib administrasi. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Leahari semenjak pemekaran Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon yang telah berlangsung selama lima belas tahun, tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa yaitu penataan administrasi desa yang belum cukup efektif dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Kurangnya kerja sama antara aparat pemerintah mengakibatkan jalannya proses administrasi terkesan lambat sehingga sampai saat ini tujuan dari administrasi desa yang ingin dicapai belum terpenuhi.

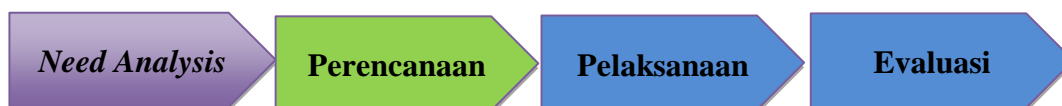
Berdasarkan *need analysis* yang dilakukan oleh tim peneliti maka permasalahan yang akan diselesaikan dalam kegiatan pengabdian adalah peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa. Bagaimana penataan administrasi desa agar bisa menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Leahari Kecamatan Leitimur Selatan.

PERMASALAHAN

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendeskripsikan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku didesa dan sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mencapai tujuan pemerintahan desa dimaksud maka sangatlah diperlukan kualitas dan kapasitas aparat pemerintah desa yang terampil sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan efisien, terlebih khusus kemampuan dalam pengolahan administrasi desa. Sebagaimana diketahui bahwa Desa Leahari merupakan salah satu dari dua wilayah desa di Kota Ambon yang masuk kategori desa sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan belum berjalan dengan efektif salah satunya akibat penataan administrasi desa yang belum baik ditambah lagi dengan kemampuan aparat pemerintah desa yang masih rendah dalam pelaksanaan tugas administrasi desa. Dari permasalahan tersebut, perlu adanya pendampingan data administrasi kependudukan desa kepada aparat pemerintah desa agar tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik ke depan dan dapat meningkatkan status desa tertinggal.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan merupakan seluruh rangkaian usulan kegiatan tim PHP2D dimana diawali melalui *Need Analysis* berdasarkan hasil analisis, diperlukan pembenahan kualitas dan kapasitas SDM aparat pemerintah desa melalui pendampingan penataan administrasi desa dan statistik potensi desa yang akurat. Sebagai ujung tombak pembangunan desa, diharapkan produktivitas dan kapasitas aparatur desa menjadi lebih baik agar mutu layanan kepada masyarakat dapat dijalankan secara optimal. Setelah itu dilakukan perencanaan yang memuat penyelerasan kebijakan pembangunan Desa Leahari dan penyusunan program bersama masyarakat disertai kesepakatan waktu, tempat, dan narasumber yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan.



Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1. Rincian Metode Pelaksanaan

No	Tahapan	Rincian Kegiatan	Target
1	<i>Need Analysis</i>	Melakukan Observasi dan Wawancara Kepada Mitra Kegiatan	Kebutuhan Mitra
2	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penselarasan Kebijakan Pembangunan Mitra Kegiatan ▪ Penyusunan Program Bersama Mitra Kegiatan ▪ Penentuan Waktu, Tempat, dan Narasumber 	Draft Rincian
3	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan <i>Updating</i> Data 	Pendampingan Kependudukan Pemutakhiran Data Kependudukan Desa

Desa			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data kependudukan dan administrasi desa menggunakan aplikasi <i>Microsoft office</i> 	Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan agar menjadi produktif sehingga dapat meningkatkan mutu layanan masyarakat.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merancang <i>database</i> desa secara digital untuk membantu pengelolaan data yang lebih <i>update</i> di masa kini dan masa akan datang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manual Book Database Kependudukan Desa ▪ Database Digital Kependudukan Desa 	
4	Evaluasi	Monitoring Kegiatan	Optimalisasi Kegiatan

PELAKSANAAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta diperbaharui dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau dengan kata lain terkait kebijakan otonomi daerah, dimana terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah telah membawa dampak yang sangat luas bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Agar tercapainya tujuan pemerintahan desa sangat dibutuhkan kapasitas aparat pemerintah desa yang baik, sehingga proses penyelenggaraan pemerintah dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, khususnya dalam penataan administrasi desa.

Desa Leahari salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon yang masuk kategori desa tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (*base line*) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa. Salah satu klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun yakni desa tertinggal yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

Desa Leahari secara geografis sebenarnya memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang tinggi akan tetapi perencanaan pemerintah desa untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang belum maksimal. Hal ini disebabkan kapasitas aparat pemerintah desa dalam penataan administrasi desa yang masih rendah sehingga proses penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari kelompok mahasiswa PHP2D Himpunan Mahasiswa Statistika Fakultas MIPA Universitas Pattimura dan Dosen Pendamping menginisiasi kegiatan pendampingan Penataan Administrasi Desa Leahari Menggunakan Aplikasi *Microsoft Office* kepada aparatur pemerintah Desa Leahari yang dilakukan secara *offline* selama dua hari tanggal 04-05 November 2021. Adapun materi pendampingan yang diberikan antara lain pelatihan MS Word untuk manajemen pengarsipan surat masuk/keluar secara digital, pengkodean dokumen, pelatihan aplikasi MS Excel untuk pengolahan data menggunakan analisa statistika deskriptif, dan pelatihan pembuatan program database dengan menggunakan Microsoft Access.

Proses pelaksanaan kegiatan seperti biasa diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber kepada peserta pelatihan dalam hal ini aparatur pemerintah Desa Leahari yang berjumlah 13 orang yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi pengetahuan peserta terhadap materi yang diberikan melalui pemberian praktek mandiri. Dari hasil evaluasi bersama, hampir sebagian besar peserta berhasil mempraktekkan dan mengimplementasikan apa yang telah diberikan oleh pemateri. Setelah pelaksanaan kegiatan pendampingan ini, antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra bersepakat untuk bersama-sama dibuatkan karya *manual book* penataan *database* Desa Leahari yang akan dipatenkan. Pelaksanaan kegiatan tidak akan berhenti sampai pada proses kegiatan akan tetapi terus berlanjut secara berkala dan terjadwal berupa pemantauan terhadap transfer keilmuan yang telah diberikan serta diupayakan sampai pada tahapan penetapan Desa Leahari sebagai salah satu Desa Binaan oleh Fakultas MIPA Universitas Pattimura yang diaktakan melalui Dokumen Perjanjian Kerjasama.

HASIL DAN LUARAN

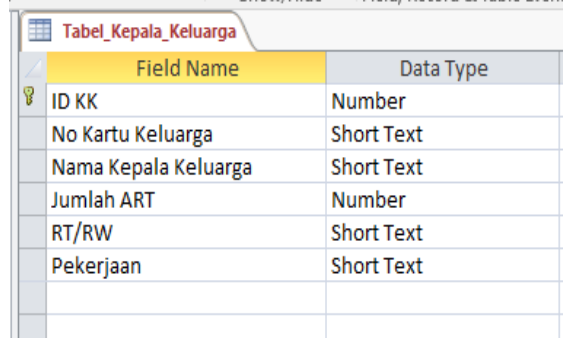
Materi penataan administrasi Desa Leahari menggunakan aplikasi *Microsoft Office* kepada aparatur pemerintah Desa Leahari antara lain :

- Pelatihan MS Word untuk manajemen pengarsipan surat masuk/keluar secara digital, pengkodean dokumen. Peserta pelatihan diberikan materi fungsi-fungsi umum dan shortcut dalam MS Word, pengaturan paragraph, cara membuat Drop Cap, aplikasi fungsi Find dan Replace, penyisipan Watermark, cara membuat halaman berbeda format (dalam satu file), cara membuat daftar isi otomatis, cara membuat tabel, cara membuat surat massal (*Mail Merge*). Berikut beberapa dokumentasi dalam pelatihan MS Word.



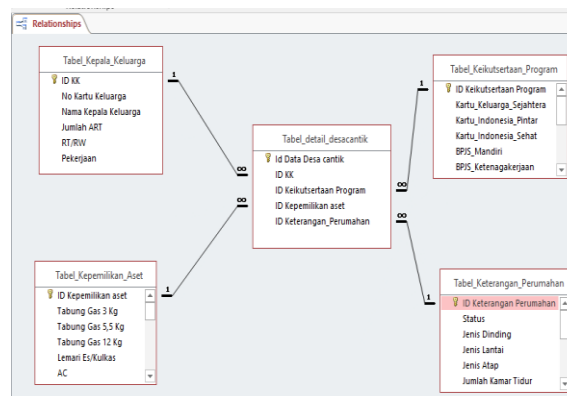
Gambar 2. Dokumentasi Pelatihan MS Word

- Pelatihan aplikasi MS Excel untuk pengolahan data menggunakan analisa statistika deskriptif. Peserta pealtihan diberikan materi pengenalan fungsi-fungsi dalam Ribbon Tab, pengenalan worksheet, input data dan penjelasan interface dari MS Excel, penggunaan rumus atau formula, pembuatan grafik melalui fitur Chart, aplikasi Pivot tabel.
- Pelatihan pembuatan program database dengan menggunakan Microsoft Access. Peserta pealtihan diberikan materi pembuatan *Table*, *Relasi*, *Query*, *Form*. Berikut layout tampilan hasil yang telah dikerjakan oleh peserta pelatihan.

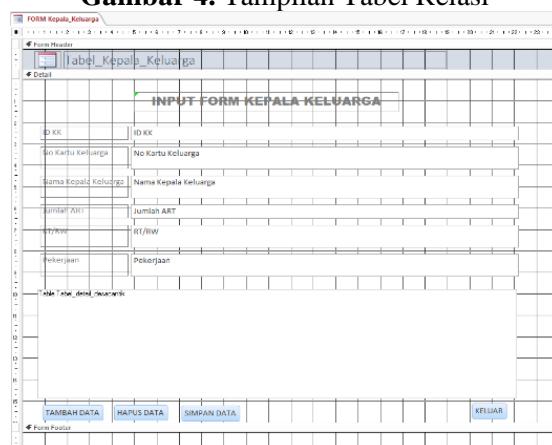


Field Name	Data Type
ID KK	Number
No Kartu Keluarga	Short Text
Nama Kepala Keluarga	Short Text
Jumlah ART	Number
RT/RW	Short Text
Pekerjaan	Short Text

Gambar 3. Tampilan Tabel Query



Gambar 4. Tampilan Tabel Relasi



Gambar 5. Tampilan Tabel Form

KESIMPULAN

Kualitas dan kapasitas aparat pemerintah desa yang terampil seyogyanya menjadi perhatian pemerintah desa untuk menjamin proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Leahari Kecamatan Leitimur Selatan selama ini mengakibatkan status desa Leahari masuk kedalam kategori desa sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun. Solusi ini coba diselesaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dosen Jurusan Matematika FMIPA Universitas Pattimura bersama kelompok tim PHP2D Himpunan Mahasiswa Statistika FMIPA Universitas Pattimura melalui kegiatan pendampingan Penataan Administrasi Desa Leahari menggunakan Aplikasi *Microsoft Office*. Melalui pelatihan yang dilakukan selama dua hari telah meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah Desa Leahari dalam penataan administrasi desa dimana sampai pada mengcreate *database* kependudukan desa secara digital. Hasil luaran ini diharapkan dapat menjadi barometer penetapan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dimana dengan data yang diupdate secara berkala dapat menentukan keputusan-keputusan yang strategis dan tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diucapkan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditbelmawa) Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupa fasilitas hibah pendanaan yang diberikan melalui Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D). Ucapan terima kasih juga tak lupa disampaikan kepada Pimpinan Universitas Pattimura dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua LPPM, Dekan FMIPA atas dukungan fasilitas sampai dengan program ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barniat, Z. 2019. Otonomi Desa, Konsepsi Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1): 20-33.
- Lembong, F., Lopian, M.T., Kalangie, F. 2017. Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1): 1-15.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama. Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

